

### Abstrak

Keterbukaan investasi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung Program Nawa Cita di Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Salah satu bentuk investasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Indonesia. Sehubungan dengan banyaknya pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka pemerintah mengatur dalam regulasi agar para pelaku usaha tersebut melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah di daerah lokasi setempat. Salah bentuk kemitraan yang dilakukan adalah kemitraan bisnis antara Transmart Sidoarjo dan UKM Binaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun sayangnya, kegiatan kemitraan toko swalayan dan UKM di Sidoarjo masih kurang optimal, seperti di Transmart Sidoarjo. Pada awal *launching* Transmart Sidoarjo per Desember 2017, jumlah UKM yang bermitra adalah sebanyak 63 UKM yang terdiri atas UKM di sektor makanan dan minuman. Namun sayangnya per Januari 2019, total UKM yang bermitra dengan Transmart Sidoarjo adalah 21 UKM. Hal ini berarti bahwa lebih dari 50% UKM telah mengundurkan diri dari kemitraan bisnis dengan Transmart Sidoarjo.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa sajakah instrumen kebijakan yang digunakan dalam kebijakan kemitraan Transmart Sidoarjo dengan Usaha Kecil Menengah binaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?; (2.) Bagaimana instrumen-instrumen kebijakan tersebut digunakan dalam kemitraan Transmart Sidoarjo dengan Usaha Kecil Menengah binaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?; (3) Bagaimana pengembangan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam kemitraan Transmart Sidoarjo dengan Usaha Kecil Menengah binaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) instrumen yang digunakan untuk pengembangan kebijakan kemitraan antara Transmart Sidoarjo dan UKM Binaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah *Family and community, Voluntary organizations, Private markets, Information and exhortation, Subsidy, Regulation, Direct Provision*. (2) instrumen-instrumen kebijakan *Family and community, Voluntary organizations, Private markets, Information and exhortation, Subsidy, Regulation, Direct Provision* digunakan dalam kemitraan Transmart Sidoarjo dengan Usaha Kecil Menengah binaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peran stake holder. Namun, implementasi instrumen kebijakan oleh dinas dan *stake holder* terkait belum optimal. (3) pengembangan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam kemitraan Transmart Sidoarjo dengan Usaha Kecil Menengah binaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menggunakan instrumen kebijakan *Private markets, Information and exhortation, Subsidy, Regulation, Direct Provision*.

Kata kunci : kemitraan, UKM, instrumen, kebijakan